

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Produk Perikanan Laris Manis Saat Pandemi Covid-19, KKP Minta Produsen Jaga Kualitas

NERACA

Jakarta - Produk kelautan dan perikanan menjadi bahan pangan yang dicari konsumen di masa pandemi Covid-19, lantaran kandungan gizinya diyakini mampu meningkatkan kekebalan. Tentu ini menjadi peluang bagi 60.000 lebih Unit Pengolah Ikan (UPI) skala UMKM di Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP), Nilanto Perbowo mengatakan, tingginya permintaan produk perikanan saat ini harus dibarengi dengan kualitas dan mutu yang berdaya saing. Untuk mendorong itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengesampingkan program yang mengutamakan kelestarian sumber daya alam, daya saing, mutu dan keamanan pangan.

"Sustainable environment harus dijaga dan seimbang dengan kesinambungan bisnisnya, mengingat keberlimpahan ketersediaan sumber daya ikan di setiap daerah. Sehingga produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan harus memiliki daya saing dan terjamin mutu serta keamanan pangannya," ujar Nilanto di Jakarta.

Hal tersebut juga Nilanto sampaikan saat membuka webinar berta-

duk 'Strategi Peningkatan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan Berdaya Saing' pada Selasa 30 Juni 2020, yang diikuti sekitar 3.000 peserta.

Komoditas ikan diakuinya merupakan produk yang mudah rusak (perishable). Namun ikan memiliki banyak keunggulan, seperti kandungan protein yang tinggi, mudah dicerna, mengandung asam lemak tak jenuh dengan kadar kolesterol yang rendah yang dibutuhkan tubuh manusia.

Produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan UPI skala UMKM harus bisa menjawab tantangan ikan yang bersifat perishable. Caranya dengan memanfaatkan teknologi untuk menjamin kualitas ikan atau mengolah ikan menjadi produk makanan yang enak dan bergizi.

"Contoh ikan lele. Mudah dibudidayakan dan memiliki keunggulan dari sisi ekonomi. Ikan lele memiliki nilai tambah dari diversifikasi produk turunan yang dihasilkan, seperti abon, keripik kulit, dendeng ikan lele, dan pastel abon," jelas Nilanto.

Salah satu UPI skala UMKM yang sukses mendiversifikasi ikan menjadi produk bernilai ekonomi adalah UMKM Al Fadh atau Poklahsar KWT Ngudi Mulyo yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. UMKM ini berhasil mengolah ikan lele menjadi 30

jenis produk makanan yang telah memiliki izin edar P-IRT, Halal dan SNI.

Nilanto juga berharap, produk kelautan dan perikanan yang diproduksi UPI skala UMKM bisa berkontribusi dalam perekonomian negara dan menjadi bagian dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020.

Dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, KKP akan menampilkan produk-produk unggulan dari 100 UPI skala UMKM yang telah menjadi binaan selam ini. Dari UPI yang terpilih ini, diharapkan mampu berkiprah dalam menarik perhatian publik terhadap aneka produk diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, sehingga produk tersebut semakin dikenal dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Penasehat Menteri KKP Bidang Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Industri Kelautan dan Perikanan, Rina Sa'adah, mengamini bahwa pandemi Covid-19 memperluas peluang pasar bagi produk pangan, termasuk yang bersumber dari hasil kelautan dan perikanan.

"Pilihan usaha mikro farming atau budidaya ikan skala mikro, urban farming atau budidaya ikan di masyarakat. mmmmb



NERACA/Anarfoto/Jessica Helma Wuysang/aww. MENANAM JAHE DI LAHAN GAMBUT : Petani jahe Mansur (40 tahun) memperlihatkan tanaman jahe hasil panen dari kebunnya di Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (2/7/2020). Di atas lahan gambut seluas 2.500 m2 yang dibuka serta dibersihkan tanpa dibakar tersebut Mansur menanam jahe dengan menggunakan teknik budidaya organik yang mengandalkan mikroba pengurai bernama F1 Embio, guna mengembalikan kesuburan untuk memperbaiki keseimbangan ekologi tanah.

Kemenkop-UMKM Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi KUMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk setiap hari melaporkan perkembangan penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk KUMKM. Baik persentase total dana yang disalurkan, maupun jumlah KUMKM yang menerima.

NERACA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ini adalah bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mensukseskan program ini. "Jika ditemukan kendala atau hambatan di lapangan, Kemenkop membuka Call Center PEN untuk KUMKM di nomor Hotline 1500 587 atau Whatsapp 08111 450 587," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada Kisek-Off Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM, di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Teten mengungkapkan, realisasi belanja untuk program PEN khusus untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp250,16

miliar. "Realisasi ini setara 0,20 persen dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp123,46 triliun," ucap Teten.

Teten mengakui, serapan dana PEN memang tergolong masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan koperasi agar bisa bertahan dari dampak buruk Covid-19 dipercepat.

"Sebenarnya, beberapa lembaga penyalur termasuk perbankan sudah mencairkan bantuan fiskal. Hanya saja, bank-bank tersebut masih banyak yang belum melakukan klaim atas dana yang sudah disalurkan kepada UMKM," jelas Teten.

Seperti diketahui, jumlah UMKM yang menerima program PEN per 1 Juli 2020 total yang disampaikan Rp250,16 miliar. UMKM dan

koperasi yang dapat dana sebanyak 212.846 unit. "Kecilnya penyaluran ini mungkin bank sudah melakukan, tapi belum klaim ke kita. Baru Bank BRI yang sudah mengajukan klaim subsidi bunga KUR," tambah Teten.

Dijelaskan Teten, untuk dana PEN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM melalui Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja bagi koperasi yang terdampak Covid-19.

"Dari anggaran Rp1 triliun tersebut, yang sudah disalurkan sebesar Rp237,2 miliar atau setara 23,72 persen," ungkap Teten. Sementara itu, kata Teten untuk dana yang sudah disalurkan atau sudah diklaim lembaga penyalur diluar dari tupoksi LPDB adalah sebesar Rp12,96 miliar. Dana ini diwujudkan melalui pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada Juli ini, akan ditargetkan sudah 50 persen (dari dana Rp1 triliun yang menjadi Tupoksi LPDB KUMKM). "Tapi itu tergantung koperasinya, mengajukan atau tidak. Sebab, ada koperasi yang hanya butuh re-

laksasi saja dan tidak mau mengajukan yang baru," tutur Teten.

Teten menegaskan bahwa seluruh dana PEN yang ditetapkan senilai Rp123,46 triliun harus sudah bisa tersalurkan maksimal pada September mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan terus melakukan koordinasi agar bisa dipercepat penyalurannya.

"Kami sebagai user pelaksana PEN untuk koperasi dan UKM akan terus mendorong dan mengakselerasi pelaksanaan PEN agar bisa segera diterima UMKM dan koperasi sesuai arahan Presiden," terang Teten.

Sebagai informasi, pagu anggaran untuk PEN khusus untuk sektor UMKM dan koperasi senilai Rp123,46 triliun tersebut terbagi dalam beberapa skema penyaluran. Yaitu, melalui program subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun. Kemudian, melalui program belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp5 triliun, PPH Final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp2,4 triliun.

Lalu, melalui penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, melalui penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp1 triliun, dan melalui pembiayaan koperasi via LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun.

"Dana PEN tersebut kemudian disalurkan kepada para pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM di Indonesia," kata Dirut LPDB KUMKM Supomo.

Menurut Supomo, dana PEN sebesar Rp1 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana dana tersebut di luar target penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM Tahun 2020 sebesar Rp1,85 Triliun yang telah dialokasikan sebelumnya.

"Dana PEN disalurkan LPDB KUMKM kepada mitra Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang kemudian diserap dan dimanfaatkan anggotanya yaitu UMKM sebagai modal kerja," jelas Supomo.

Supomo juga menjelaskan, "melalui dana Rp1 triliun, ditargetkan sebanyak 266 koperasi dan 4,8 juta UMKM mendapatkan perkuatan modal pinjaman atau pembiayaan di masa pemulihan ekonomi saat ini." rfm/igro



NERACA/Anarfoto/ David Muhandarsyah/aww

PENJUALAN MASKER KHUSUS PELAJAR : Penjual memajang manekin yang mengenakan masker bagi pelajar di sebuah toko di Bengkulu, Kamis (2/7/2020). Masker bermotif khusus menyesuaikan seragam pelajar SD, SMP, dan SMA/SMK dan logo Tut Wuri Handayani tersebut dijual Rp10.000 per lembarnya.



PT GUNA TIMUR RAYA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GUNA TIMUR RAYA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Tempat : Ruang Copper 1 - Hotel Golden Boutique
Jl. Angkasa No. 1, Jakarta 10720

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020
4. Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020

Dan Agenda RUPS LB sebagai berikut :

1. Penjaminan Aset Perseroan untuk Menjamin Fasilitas Kredit Perseroan di Bank
- Catatan:
1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan;
 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimira Jasa Korpora pada tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahananya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY KSEI") yang dapat diakses di situs resmi KSEI https://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengundungi formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan http://www.gunatimurraya.com dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Penganggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan http://www.gunatimurraya.com dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Penganggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan Kolektif wajib membawa Surat KTP yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
 6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - d. Perseroan akan mengemukakan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juli 2020
Direksi Perseroan

NERACA

Yogyakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya sektor perdagangan melalui revitalisasi pasar rakyat.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di sektor perdagangan. "Hal ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah serta meningkatkan daya saing pasar rakyat," ujar Agus.

Agus pun mengakui, hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu misi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yakni pembangunan yang merata dan berkeadilan. Sehingga untuk mendukung misi tersebut, Kementerian Perdagangan akan meneruskan program revitalisasi pasar rakyat.

Program pembangunan pasar rakyat dilakukan melalui dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran tugas pembantuan. Selama 2015-2019 secara keseluruhan telah dibangun 5.264 unit pasar melalui lintas kementerian. Khusus Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 4.949 pasar rakyat.

"Pada 2019 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 1.034 pasar rakyat. Sedangkan pada 2020, Kementerian Perdagangan telah menetapkan pembangunan 143 unit pasar rakyat dari 140 kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2020," papar Agus.

Agus mengatakan, pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian

masyarakat di Indonesia. Selain itu, pasar rakyat juga memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

"Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat di Indonesia," kata Agus.

Menurut Agus, pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menyokong perekonomian negara. Peran tersebut di antaranya adalah menjadi simpul kekuatan ekonomi lokal, memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah; dapat meningkatkan kesempatan kerja maupun berwirausaha. Lalu menjadi tempat berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan sebagai tempat referensi harga bahan pokok di daerah tersebut.

Harapannya, pasar rakyat menjadi salah satu sarana distribusi yang dapat berperan dalam memperluas arus barang antarwilayah. Pasar rakyat diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

sekitar pasar.

"Diharapkan pasar rakyat ini dapat dikelola dan dipelihara dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kenyamanan pengunjung serta para pedagang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman," harap Agus.

Sementara itu, Sekjen Kemendag yang juga Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengungkapkan, program revitalisasi pasar rakyat mencakup empat aspek yakni revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya.

"Revitalisasi manajemen pengelola berpedoman pada SNI Pasar Rakyat 8152:2015 dengan mempertimbangkan peningkatan profesionalisme pengelola, pemberdayaan pelaku usaha, serta penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat," terang Suhanto.

Suhanto juga mengungkapkan, saat ini pasar Gentan telah dilengkapi sarana pos ukur ulang. Keberadaan pos ukur ulang ini merupakan wujud perlin-

dungan bagi konsumen dan tanggung jawab pedagang untuk berdagang secara jujur di Pasar Gentan.

"Kepatuhan para pedagang di Pasar Gentan tercermin dengan kepatuhan dalam menjual bahan pokok tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan, tidak menjual bahan pangan yang sudah kadaluarsa, dan tidak menjual bahan pangan mengandung bahan berbahaya," papar Suhanto.

Sementara itu, Bupati Sri Purnomo menambahkan, selain bertransaksi fisik, pasar rakyat Gentan juga telah berjualan secara daring. Bahkan, pelaksanaan perdagangan secara daring telah dimulai sebelum adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan telah bekerja sama dengan platform niaga elektronik.

Revitalisasi Pasar Gentan dilaksanakan pada 2017 dengan biaya sebesar Rp6 miliar yang berasal dari APBN. Pasar ini dibangun di lahan seluas 1.925 m dan dapat menampung 261 pedagang. Sebelum direvitalisasi pasar ini memiliki omzet Rp50 miliar pertahun dan direvitalisasi omzet meningkat menjadi Rp60-70 miliar per tahun. iwan/igro

PENGUMUMAN

Alston S, Jl Sekolah Kencana IV C blok TN No 19, Jakarta Selatan dan Axton S, Plaza Mutiara Lt. 5, Jl Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No 1&2, Jakarta Selatan, akan menggabungkan saham-saham dalam PT Cakra Kumala Indah, berkedudukan di Jakarta Selatan, Plaza Sentral Lt. 20, Jl Jend Sudirman kav 47 (Perseroan). Pengambilalihan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan, karenanya yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman ini.

Jakarta, 6 Juli 2020
Alston S Axton S
PT Cakra Kumala Indah
Direksi